



ANTHROPOS:

Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

Hari Jadi Kota Binjai Dalam Tinjauan Historis

Wiwik Lestari*

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara, Indonesia

Diterima Pebruari 2017; Disetujui April 2017; Dipublikasikan Juni 2017

Abstrak

Penelitian ini ingin mencari tahu bagaimana sebuah kota menentukan hari jadinya. Penelitian ini adalah sebuah studi kepustakaan yang memerlukan data-data, dokumen, serta arsip-arsip milik pemerintah Kota Binjai. Selain itu sebagai perbandingan, peneliti juga menggunakan beberapa literatur terkait perkembangan kota dan juga membandingkan kelahiran kota Binjai dengan kelahiran beberapa kota lain di Indonesia. Hari jadi kota Binjai yang selama ini diperingati setiap tahunnya pada setiap tanggal 17 Mei, merupakan bentuk pemujaan terhadap simbol atau lambang kesejarahan. Makna kesejarahan tersebut di ambil dari peristiwa heroik Perang Timbang langkat yang terjadi pada 17 Mei 1872 di sekitaran wilayah Kota Binjai yang sekarang. Dasar penentuan hari jadi kota berdasarkan simbol kesejarahan tersebut memang layak digunakan bila kita melihatnya dari segi sudut pandang yang demikian. Tetapi dari sudut pandang definisi kota, tanggal hari jadi Kota Binjai yang selama ini digunakan belum dapat memenuhi kriteria kelayakan hari jadi kota. Nilai heroisme yang diharapkan dapat merangsang rasa nasionalisme warga kota tanpa disadari telah mengaburkan fakta yang sebenarnya, yaitu tentang sejak kapan sebenarnya Binjai menampakkan ciri sebagai kota. Dalam penelitian ini, peneliti meninjau ulang masalah penentuan hari jadi Kota Binjai. Binjai yang kini telah berkembang menjadi kota jasa dan industri perlu untuk kembali memperhatikan historiografinya.

Kata Kunci : Hari Jadi; Sejarah; Kota Binjai.

Abstract

This study is a literature study that requires data, documents, and archives belonging to the government of Binjai. In addition, as a comparison, the researchers also used some of the literature related to the development of the city and also compares the birth city of Binjai with the birth of several other cities in Indonesia. Anniversary of the city of Binjai which has been celebrated annually on each May 17, is a form of worship to a symbol or emblem of history. The historical meaning taken from the heroic events Langkat Weigh War that occurred on May 17, 1872 Regional Binjai region that now. The basis for determining the anniversary of the city based on historical symbols is indeed feasible to use when we view it in terms of such viewpoints. But from the standpoint of the definition of the city, on the anniversary of Binjai that have been used have not been able to meet the eligibility criteria anniversary of the city. The value of heroism that are expected to stimulate a sense of nationalism unwitting townspeople have obscured the true facts, which is about how long Binjai actually reveal characteristic as a city. In this study, researchers reviewed the problem of determining the day Binjai. Binjai has now evolved into a city of services and industry need to re-pay attention the historiografi. Today Binjai not only should be commemorated and remembered every year, but it also must be determined in accordance with the facts and the actual data.

Keywords: Anniversary; History; Binjai City

How to Cite: Lestari, W. (2017), Hari Jadi Kota Binjai Dalam Tinjauan Historis, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 3 (1): 1-10

*Corresponding author:
E-mail: lestariwiwik201180@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Istilah kota digunakan masyarakat secara umum untuk menyebutkan suatu wilayah tertentu yang dianggap sudah lebih maju dari wilayah lain disekitarnya. Namun berbeda pada beberapa bidang keahlian tertentu seperti demografi, ekonomi pembangunan, sosiologi, dan bidang sejarah perkotaan. Kata kota berdasarkan bidang keahlian tertentu jadi memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda, tergantung kepada siapa yang membuat batasannya.

Pengertian kota menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah menyebutkan bahwa Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sementara pengertian kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.4 Tahun 1980, Kota adalah suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, dan ibu kota kecamatan yang mempunyai fungsi sebagai pusat pertumbuhan.

Senada dengan hal tersebut pada undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Dari uraian diatas kota tergambar sebagai tempat yang dipandang dan dirasakan dari berbagai segi dan sudut pandang, mulai dari keaktifan, keberagaman, dan kompleksitasnya. Menurut Branch (1996), kota dapat dilihat dari 3 (tiga) hal, yaitu secara fisik, sosial dan ekonomi. Kota secara fisik menurut Branch terdiri atas tiga tingkatan, yaitu: (1) Bangunan-bangunan dan kegiatannya yang berada di atas atau dekat dengan muka tanah,

(2) intalasi-instalasi di bawah tanah, (3) kegiatan-kegiatan di dalam ruangan "kosong" di angkasa.

Kemudian secara sosial dijelaskan oleh Branch (1996), kota yaitu adanya sekelompok orang yang menjadi alasan dan tujuan terbentuknya komunitas yang diciptakan pada awalnya untuk meningkatkan produktivitas, melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja dan memungkinkan adanya diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif kota-kota.

Lebih jauh Branch (1996) mengemukakan kota secara ekonomi yaitu dapat diuraikan sebagai fungsi dasar kota untuk menghasilkan penghasilan melalui produksi barang dan jasa, guna mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu sendiri yang dapat ditinjau dari ekonomi pemerintah, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus.

Sebenarnya gejala kota sudah ada sejak ribuan tahun lalu ketika kota-kota awal lahir. Munculnya kota untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia terjadi di lembah sungai Nil, Eufrat-Tigris, Indus, dan Huangho. Para ahli kebudayaan melihat lahirnya pemukiman berupa kota di daerah-daerah tersebut sebagai akibat telah terpenuhinya bahan pangan yang dihasilkan oleh pedesaan. Dengan sendirinya orang-orang terbebaskan dari pekerjaan mengolah tanah, dan mulai hidup dari kegiatan non-agraris sebagai mata pencahariannya. Misalnya muncul kaum pedagang dengan barang niaganya, lalu bersamaan muncul kaum penjual jasa dan transportasi.

Sejak manusia mulai memasuki zaman sejarah, penulisan tentang mulai terbentuknya kota-kota di dunia sudah mulai ada. Seperti misalnya tulisan tentang kota-kota yang muncul di India dan daratan Cina yang diawali dengan dimulainya kehidupan pertanian penduduk di sepanjang sungai Ravi dan lembah sungai Huangho (2000-1500 SM). Juga ada tulisan tentang perkembangan wilayah di Yunani dan Romawi. Kedua kota besar di Eropa ini muncul sejak dimulainya kehidupan pelayaran oleh bangsa Phunisia dan Yunani di kota pelabuhan

Korinthe dan Mileus, dan kehidupan perdagangan di kota Roma dan Alexandria. Juga sama halnya yang terjadi di wilayah sekitaran Inggris (Durhan, Shrewbury, dan Chester), awal mulainya kehidupan penduduk disana adalah perdagangan dan industri. Selain itu, kota Mekkah di Jazirah Arab merupakan kota yang paling pesat perkembangannya. Kota tersebut muncul diawali dengan bermukimnya suatu Clan di daerah pertanian yang letaknya dekat dengan sumber mata air.

Daldjoeni (1998) dalam tulisannya menyebutkan bahwa kota-kota di Indonesia masing-masing memiliki perbedaan peristiwa pada saat awal mula munculnya. Misalnya kota Yogyakarta, kota ini mulai muncul sejak dibangunnya benteng kraton Yogya yang pada saat itu dibuat dengan tujuan memisahkan pemukiman antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Berbeda dengan Yogyakarta, pada kota Surakarta peranan sungai Bengawan Solo yang sangat besar menjadi penyebab dimulainya kehidupan pertanian penduduk di sepanjang pinggiran aliran sungai yang subur. Juga tak ketinggalan kota Demak dan Cirebon, kedua kota ini lahir sebagai kota sejak wilayah tersebut berfungsi sebagai jalur perdagangan yang masuk melalui Bandar-bandar pelabuhannya.

Peringatan hari jadi sebuah kota secara umum di anggap sebagai peringatan pertambahan usia yang dihitung sejak hari awal lahirnya kota tersebut dalam suatu wilayah tertentu. Sering sekali masyarakat mengidentikkan perayaan hari jadi dengan kegiatan-kegiatan seremoni, dan mengabaikan esensi yang sebenarnya dibalik itu. Hal ini seperti yang terjadi pada kota Binjai. Setiap tahun kota Binjai memperingati hari jadinya yang menjadi agenda tahunan yang sangat ditunggu-tunggu masyarakatnya. Pada tanggal 17 Mei setiap tahun kegiatan hiburan rakyat selalau menghiasi perayaan ulang tahun kota Binjai dengan sangat meriah.

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Bappeda TK II Kota Binjai tahun 1997, penetapan tanggal hari jadi kota Binjai yang sekarang ini digunakan adalah berdasarkan

peristiwa heroik yang disebut sebagai peristiwa Perang Timbang Langkat. Pada peristiwa tersebut terjadi pertempuran yang amat membekas di hati masyarakat dalam perjuangannya melawan penjajahan Belanda. Perang yang banyak merenggut korban dari pihak pejuang tersebut terjadi pada tanggal 17 Mei 1872. Di dalam uraian Bappeda tidak disebutkan apa kriteria yang menunjukkan Binjai kemudian lahir sebagai sebuah kota, tetapi lebih kepada alasan bahwa pemilihan tanggal tersebut adalah untuk mengenang peristiwa heroik Perang Timbang Langkat semata. Tidak adanya uraian tentang kapan Binjai menjadi sebuah kota menjadi tanda Tanya besar bagi peneliti. Sepertinya adalah wajar jika hari lahir kota Binjai di tentukan berdasarkan kriteria yang menunjukkan Binjai sudah selayaknya di sebut sebagai daerah/wilayah perkotaan.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejak kapan sebenarnya Binjai menunjukkan kriteria sebagai sebuah kota?

Sejalan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah mencari tahu titik awal Binjai menampakkan ciri sebagai sebuah kota.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan sebagai suatu metode penelitian dengan cara menelaah dokumen-dokumen atau catatan-catatan administratif terbentuknya kota Binjai sebagai data primer. Tidak lupa juga peneliti mengumpulkan informasi-informasi lainnya sebagai pelengkap pada data primer dengan cara mengumpulkan beberapa literatur terkait sejarah terbentuknya kota-kota di daerah lain dan peneliti menyebutnya sebagai data sekunder. Hasil temuan data primer dengan data sekunder kemudian di analisis dengan metode berfikir ilmiah, yakni dengan cara membandingkan kedua data untuk mengambil suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat penulisan catatan sejarah di Indonesia tentang perkembangan wilayah-wilayah tertentu baru mulai ada sejak abad ke-20, yang menuliskan kota-kota ini berperan dan berfungsi seperti apa yang kita kenal sekarang sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan jasa dan industri. Berdasarkan hal tersebut Sinulingga (1999) menjelaskan bahwa bila melihat pertumbuhan kota-kota di Indonesia dari aspek perkembangan sejarahnya, maka perkembangan kota di Indonesia di bagi atas: kota prakolonial, kota zaman kolonial, dan kota masa transisi menuju kota modern. Dari penjelasan Sinulingga tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perkembangan kota-kota di Indonesia secara general dikelompokkan sebagai kota-kota warisan kolonial Belanda yang pada masanya dulu dibangun untuk memperlancar pemerintahan dalam rangka pengendalian rakyat jajahan dan pengumpulan hasil perkebunan.

Yang terjadi di beberapa kota di Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Melver dan Page dalam Menno (1991) yaitu ; "Kota-kota akan tumbuh jika suatu masyarakat atau sekelompok orang dalam masyarakat memperoleh control yang lebih besar atas sumber-sumber daya dari pada yang diperlukan hanya untuk hidup saja. Dalam peradaban kuno sumber-sumber daya itu terutama diperoleh melalui penguasaan manusia atas manusia". Dengan demikian menurut Melver dan Page kota mulai ada dan tumbuh bila ada penguasaan manusia yang memiliki daya control yang lebih besar sifatnya terhadap manusia yang lain.

Sementara Branch (1996) melihat pertumbuhan kota dari lingkungan fisiknya. Menurutnya situasi dan kondisi lokasi setempat dapat menjadi alasan didirikannya sebuah kota, sebagai berikut : "Jika para pendiri kota mempunyai maksud untuk mengembangkan kegiatan niaga kelautan di dalam pemukimannya..., maka kota mestinya berlokasi di tepi pantai atau sepanjang tepi sungai yang memiliki akses ke laut dengan menggunakan kapal. Jika suatu kota

dimaksudkan untuk menampung para pekerja perusahaan galian di pegunungan, maka mestinya kota dibangun cukup dekat dengan daerah penambangan untuk menghemat waktu dan biaya menglaju...".

Definisi kota secara lengkap disampaikan oleh Hoekveld dalam Daljoeni (1998), yaitu: (1) Berdasarkan aspek morfologis; perbandingan bentuk fisik kota dengan fisik pedesaan; (2) Jumlah penduduk; kota diukur berdasarkan jumlah penduduknya. Di Indonesia sementara ini digunakan kriteria kota demikian: kota kecil berpenduduk 20.000-50.000 jiwa, kota sedang 50.000-100.000 jiwa, kota metropolitan 1 juta-10 juta jiwa. (3) Hukum; adanya hak-hak hukum tersendiri bagi penghuni kota. (4) Ekonomi; hidup yang non-agraris, fungsi khasnya kota lebih kultural, industri, dan perdagangan. (5) Sosial; hubungan-hubungan antar penduduk secara sosial *impersonal*, yaitu orang bergaul serba lugas dan sepintas lalu. Pada zaman Hindia Belanda beberapa kota di pulau Jawa seperti kota Salatiga, Sukabumi, dan Probolinggo yang berstatus *haminte (gemeente)* dengan jumlah penduduk berkebangsaan Eropa lebih dari 10%. Mereka ini secara hukum Belanda di atur sebagai penduduk kota di bawah kekuasaan *burgemester* (wali kota). Dan setelah tahun 1945, kota Salatiga, Sukabumi dan Probolinggo tetap diakui sebagai kota kecil oleh pemerintah Indonesia yang baru saja lahir. Sama halnya dengan ketiga kota tersebut, kota Binjai sebelum dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1974 adalah sebuah *gemeente*, yaitu sebuah kota warisan Kolonial yang mulai bergeliat.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pokok-pokok pemerintahan, juga di dalamnya mengatur tentang adanya hak otonom dalam menjalankan pemerintahan di setiap daerah. Maka pada tahun 1965 setelah Binjai ditetapkan sebagai Kota Madya oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No.18 Tahun 1965, kemudian sebagai wilayah baru Binjai mulai mencari jati dirinya dengan membentuk sebuah Panitia Penetapan Hari Jadi Binjai sekitar tahun 1980-an.

Sinar (1980), dalam bukunya mengutip catatan perjalanan Jhon Anderson ke Asia menyebutkan bahwa pada tahun 1823-1826 diceritakan gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk berkunjung ke pesisir Sumatera. Disebutkan dalam salah satu kunjungan Anderson tersebut, terdapat kampung Ba Binjai yang berpenghuni kira-kira 50 rumah tangga. Kampung Binjai di pimpin oleh seseorang bernama Datuk O.K. Kolok. Kampung tersebut berstatus kejuruan di bawah kekuasaan Sultan Langkat.

Berdasarkan letak geografisnya, Binjai adalah daerah yang sangat subur. Letaknya yang berada di sepanjang sungai Bingai yang setiap waktu mengalirkan lumpur humus dari hulu yang mengendap di muara merupakan sebuah proses sedimentasi yang sempurna. Pada masa pemerintahan tradisional, banyak penduduk lokal yang melakukan pernikahan lintas etnis. Banyak di antaranya terjadi pernikahan antara etnis Karo dengan Batak. Fenomena ini menyebabkan perubahan yang cukup signifikan di Binjai. Daerah ini mulai lebih terbuka terhadap kedatangan penduduk dari daerah lain. Pedagang-pedagang Inggris yang melintas pun mulai memperhatikan kampung Binjai, terutama sejak adanya tulisan Anderson. Dan selanjutnya ada aktivitas yang cukup sibuk di Bandar pelabuhan Binjai yang memasok lada ke Penang oleh kapal-kapal Inggris.

Selanjutnya perkembangan Binjai sebagai sebuah kampung yang mulai beralih dari agraris ke non-agraris tercium oleh Jacobus Nienhyus. Dengan ambisi membangun perkebunan tembakau raksasa di Deli, Nienhyus dan pengusaha-pengusaha *oderneming* lainnya membeli tanah rakyat dengan persetujuan Sultan Deli (Said, 1990), berusaha mendapatkan konsesi tanah hingga ke Binjai, Langkat (Stabat), dan Aceh. Daerah Binjai yang kemudian dijadikan perkebunan tembakau meliputi wilayah Bandar Sinembah, Tanjung Jati, Kuala, dan Selesai (1868-1869). Maka dengan perluasan wilayah perkebunan Tembakau oleh Belanda tersebut, daerah Binjai

semakin ramai oleh kedatangan para buruh (pekerja) dari Jawa, China, dan India.

Pada tahun 1887, Belanda membagi wilayah kekuasaannya di Sumatera Timur kepada beberapa wilayah *afdeling*. Salah satunya adalah *onder afdeling* Langkat hulu (Binjai). Dengan otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah *afdeling* tersebut lalu pada tanggal 23 Juli 1903 dikeluarkan pasal *desentralisiewed* yang berisi penetapan 19 wilayah di Jawa dan 13 wilayah di luar Jawa (salah satunya Binjai) menjadi *gemeente*. Adapun alasan pemerintah Belanda menetapkan Binjai dan wilayah lainnya sebagai *gemeente* adalah karena wilayah-wilayah ini dinilai telah maju pesat dalam bidang perekonomian (jasa dan niaga), terutama dalam usaha perkebunan (Harahap, 1994).

Setelah masa kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda berakhir dan digantikan oleh pendudukan Jepang, Binjai tidak mengalami perubahan yang berarti kecuali bergantinya orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kemudian, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah provinsi Sumatera Timur dengan gubernur pertama yang menjabat adalah Mr. Tengku Mohammad Hasan.

Untuk memudahkan jalannya pemerintahan yang baru di Sumatera Utara dan Keresidenan Sumatera Timur, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tanggal 10 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang sampai berdirinya Negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, sebelum diadakan yang baru menurut UUD ini masih berlaku asal tidak bertentangan dengan UUD tersebut. Maka kemudian Mr. T.M.Hasan membentuk tim khusus untuk mengatur jalannya pemerintahandi daerah dengan mengadakan perundingan bersama Sultan Kerajaan Langkat dan Gubernur Sumatera bertempat di Istana Sultan di Tanjung Pura. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain yaitu :

Bahwa Kesultanan Kerajaan Langkat di bawah perlindungan dan naungan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Gubernur Provinsi Sumatera.

Tengku Amir Hamzah diangkat dan ditetapkan menjadi Asisten Residen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk wilayah Langkat dan berkedudukan di kota Binjai.

Usia pemerintahan yang baru ini berjalan hingga tahun 1946 yaitu ketika terjadi Peristiwa Revolusi Sosial di Sumatera Timur. Karena insiden ini Tengku Amir Hamzah dan seluruh pejabat di Langkat diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 5 Maret 1946 melalui Rapat Komisi Nasional di Binjai yang diadakan oleh Komite Nasional Residen Sumatera Timur (Panitia Penyusunan Sejarah Langkat-Binjai, 1993). Kemudian Komite mengangkat dan menetapkan asisten residen serta para wedana baru di wilayah Langkat, dan membubarkan serta mengganti nama Daerah Swapraja Kerajaan Langkat menjadi kabupaten Langkat pada tanggal 25 Maret 1946.

Pada masa *clash* kedua dengan pemerintah Belanda di bulan Desember 1948, pemerintah Belanda kembali mengaktifkan pemerintahan di daerah swapraja di wilayah Sumatera Timur sampai tahun 1949. Lalu pada tahun 1950, peraturan tentang daerah swapraja kembali dihapus. Dalam perkembangan selanjutnya Aceh menuntut untuk dijadikan sebuah provinsi sendiri sehingga di Sumatera Timur terjadi perubahan wilayah menjadi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Labuhan Batu.

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan UU No.7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom, dan UU Darurat No.8 Tahun 1956 tentang pembentukan otonom kota-kota besar, serta UU No.9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah kota kecil, dalam rangka menjaga kelancaran pembentukan kabupaten otonom di daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Binjai digolongkan ke dalam kota kecil bersama-sama dengan Tanjung Balai dan

Tebing Tinggi. Sementara Medan digolongkan ke dalam kota besar bersama-sama dengan Pematang Siantar dan Sibolga. Bersamaan dengan penetapan Binjai menjadi kota kecil, kemudian Binjai mengalami perluasan dari luas wilayah 267 ha pada tahun 1917 menjadi 1.710 ha di tahun 1956. Dengan luas wilayah yang bertambah dan berpengaruh pada laju kemajuan yang signifikan dalam perekonomiannya, pemerintah pusat kemudian menganggap Binjai telah mampu berdiri sendiri. Maka Binjai kemudian ditetapkan sebagai daerah otonom kota kecil atau kotapraja. Bersamaan dengan hal tersebut, wilayah Binjai secara resmi terpisah dari Kabupaten Langkat (Panitia Penyusunan sejarah langkat-Binjai, 1993).

Kota Binjai yang hingga saat ini yang terus berbenah telah mengalami beberapa kali transformasi seiring dengan terjadi pergantian di pucuk pimpinannya (walikota). Namun Binjai yang dikenal sebagai kota Rambutan tetap berdiri sebagai kota yang maju dan asri. Wajah kota Binjai yang telah banyak mengalami perubahan menunjukkan keberhasilan pembangunan di kota ini, yang semua itu tidak lain adalah juga berkat dukungan masyarakatnya.

Adapun literatur tentang peristiwa Perang Timbang Langkat yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1972 yang peneliti temukan, tersebar dalam beberapa buku, di antaranya adalah buku karya Tengku Lukman Sinar. Dari potongan-potongan catatan tentang peristiwa Perang Timbang Langkat yang bersumber pada buku-buku karya T. Lukman Sinar tersebut, berikut ini peneliti akan menguraikannya kembali secara kronologis :

Sinar (1980) menceritakan bahwa berdasarkan Traktaat Siak yang disepakati antara Kerajaan Siak dengan Belanda pada tahun 1858, maka Belanda mendatangkan 7 (tujuh) buah kapal perangnya untuk membantu Siak menyerang Asahan, Serdang, Tamiang, Stabat, dan Batubara yang di anggap membangkang terhadap ultimatum Netscher di tahun 1863. Kehadiran kekuatan Belanda tersebut membuat Kantelir Cats De Raet

bersama-sama dengan Sultan Deli Mahmud dan Datuk Setia Raja Hampan Perak berani dating ke Sunggal untuk membujuk dan jika perlu menggertak Sunggal agar mau kembali mematuhi Traktaat Siak.

Pada tahun 1964 untuk pertama kali seorang pioner berkebangsaan Belanda yaitu J. Nienhyus membuka kebun dan menanamnya dengan tanaman tembakau. Untuk memperkuat modal, Nienhyus tidak bekerja sendiri. Ia mengajak rekanannya Janssen dan P.W. Clemen. Perkongsian ini di tahun 1866 menjadi cikal bakal didirikannya Deli *Maatschappij*, yaitu sebuah perusahaan bergerak di bidang perkerata-apian yang di buat untuk memudahkan mengangkut hasil-hasil perkebunan di Deli.

Melihat perkembangan di Deli dan Langkat, Datuk Sunggal merasa sangat kecewa. Sunggal melihat hampir seluruh tanah-tanah kepunyaan rakyat diberikan begitu saja kepada Belanda untuk konsesi perkebunan tembakau, sedangkan keuntungannya sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat. Puncak dari kekecewaan ini adalah ketika Sultan Deli Mahmud di tahun 1870 berani menyerahkan tanah rakyat di wilayah Sunggal kepada maskapai Belanda *De Rotterdam*. Seketika Kerajaan Sunggal menyatakan perang untuk mempertahankan tanah tumpah darahnya. Sebanyak 1500 orang prajurit dikumpulkannya untuk membuat benteng pertahanan di Timbang Langkat. Sejumlah persenjataan disiapkan pula untuk menyambut perang. Kerajaan Sunggal juga menyertakan saudara-saudaranya di kejuruan-kejuruan Selesai dan Bahorok di Langkat dan membuat Benteng di hulu Sungai Wampu.

Peperangan pun terjadi dengan tidak seimbang. Pasukan Deli yang di pimpin Pangeran Musa dengan bantuan prajurit dan persenjataan dari Belanda berhasil memukul mundur perlawanan prajurit Sunggal di Kejuruan Selesai dan Bahorok, dan mereka terpaksa mundur ke pegunungan. Sementara pejuang Sunggal lainnya yang terdiri dari 1000 orang Karo dan 500 orang Melayu berhasil membakar bangsal-bangsal tembakau dan rumah-rumah tuan kebon untuk menghentikan

produksi tembakau saat itu. Perlawanan ini membuat banyak para tuan kebon mengungsi ke Labuhan Deli, sementara mereka meminta bantuan dari Residen Belanda di Riau untuk mengatasi para pejuang Sunggal.

Tanpa menunggu waktu yang lama, Residen Belanda di Riau yaitu Mr. Netscher segera mengirimkan satu ekspedisi gabungan angkatan darat dari tanjung Pinang dan angkatan laut dari kapal-kapal perang *Banka* dan *den Briel* yang di pimpin oleh Kapten W. Koops ke Sunggal. Selain itu ditambah lagi dengan ratusan laskar prajurit Sultan Deli dan Pengeran Langkat. Prajurit gabungan ini disiapkan untuk menyerang pasukan Sunggal dengan tujuan tidak hanya meredakan pemberontakan tetapi juga menyelamatkan perkebunan *Arensburg*, *Perseverance*, dan *Rotterdam* di Langkat.

Pertempuran memang tidak bias dihindari lagi. Para pejuang telah bersiap di benteng-benteng yang kuat di Timbang Langkat. Mereka juga telah mempersiapkan strategi rute mundur ke hulu Sungai Mencirim jika seandainya mereka terdesak. Namun pada kenyataannya, saat pertempuran terjadi pasukan yang di pimpin W.Koops berhasil memotong arah mundur para pejuang. Sementara Laskar Langkat mengepung para pejuang dari arah sungai Bingai. Lalu pada pagi hari tanggal 16 Mei 1872 kebun *Arensburg* berhasil diduduki oleh pasukan yang dipimpin Kontelir Dee NS bersama *Administratur Perseverance*.

Pada keesokan harinya tanggal 17 Mei 1872, ketika iringan pasukan Belanda yang berhasil bertahan terhadap serangan pejuang di daerah Kebun Lada di hari sebelumnya telah sampai di wilayah pertemuan antara sungai Bingai dan sungai Mencirim, kembali terjadi pertempuran dengan para pejuang Sunggal. Pasukan Belanda di serang oleh para pejuang dengan tembakan-tembakan beruntun. Di daerah itu ternyata sudah di bangun kubu-kubu pertahanan dan di kelilingi oleh parit-parit yang dalam serta ditanami ranjau-ranjau. Satu detasemen pimpinan Letnan Lange kemudian dikerahkan untuk menggempur kubu-kubu

tersebut. Dengan menggunakan meriam dan persenjataan yang lengkap akhirnya pasukan Lange berhasil menguasainya selama 3 hari. Pada hari ketiga tanggal 19 Mei 1872, pasukan bantuan yang dipimpin Pangeran Langkat berhasil menghalau para pejuang dari kubu-kubu tersebut, dan mereka berhasil melarikan diri melalui kampung Rantau Bentul di hulu sungai Bingai.

Lelah menghadapi berbagai serangan para pejuang yang bertubi-tubi, dengan sisa pasukan yang ada Belanda akhirnya membakar dan merampok setiap kampung-kampung yang dilewati. Mereka juga menghancurkan benteng Timbang Langkat yang sebelumnya telah berhasil mereka duduki. Dengan cara ini mereka berharap dapat mematahkan perlawanan rakyat Timbang Langkat. Belanda juga mendatangkan ekspedisi ke dua dan ke tiga dari Betawi dengan kapal *William Mc Kinnon* dan tiba di Deli pada tanggal 23 September 1872.

Gagal dengan segala upayanya dengan cara kekerasan berusaha meredam perlawanan pasukan pejuang, akhirnya Belanda merubah strateginya. Dengan tujuan menangkap pimpinan pejuang yaitu Datuk Kecik, Datuk Djalil, dan Sulong Barat, Belanda mengajak melakukan gencatan senjata dengan dalih melakukan perundingan damai. Kemudian disepakati akan ada pertemuan antara kedua belah pihak pada tanggal 25 Oktober 1872 di Sunggal. Tanpa menaruh curiga ketiga Datuk pimpinan para pejuang datang memenuhi undangan perundingan yang dijanjikan pihak Belanda. Namun pada saat perundingan terjadi, salah seorang Residen Riau yang hadir dalam pertemuan itu menuntut Datuk Kecik harus meminta maaf pada Gubernur Jenderal Belanda di Betawi. Karena merasa dirinya berjuang dalam rangka membela hak rakyat dan negerinya, Datuk Kecik dan teman-temannya menolak meminta maaf kepada Belanda. Mendengar pernyataan Datuk Kecik, Residen Riau tersebut kemudian memerintahkan Datuk Kecik dan teman-temannya di tawan dan dilucuti senjatanya. Mereka kemudian dibawa

ke Labuhan Deli dan dinaikkan ke atas kapal yang segera berlayar ke Riau.

Tidak lama berselang, dari Riau Datuk Kecik dan teman-temannya ditawan di Tanjung Pinang selama 10 bulan lamanya. Baru setelah itu mereka dibawa ke Betawi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup disana. Lalu pada 6 September 1874 Datuk Djalil meninggal dunia disana. Tidak lama berselang disusul pula oleh meninggalnya Datuk Kecik pada 15 Juni 1876. Sedangkan Sulong Barat dipulangkan ke Sunggal pada tahun 1885 dan tutup usia disana pada tahun 1912.

Berdasarkan definisi kota yang digunakan oleh para ahli, Binjai sebagai sebuah kota dapat dilihat sejak adanya penetapan Binjai sebagai *gemeente* oleh pemerintah Kolonial Belanda yaitu pada tanggal 23 Juli 1903. Pada saat itu pemukiman di daerah Binjai telah mengelompok membentuk lokalitas yang dapat dibedakan dengan daerah lainnya. Dan sejak dibukanya perkebunan tembakau disana, jumlah penduduk pun semakin bertambah seiring dengan bertambahnya para pendatang seperti pedagang dan buruh perkebunan.

Pada bidang perekonomian, perkembangan yang terjadi sangat signifikan ketika pemerintah Kolonial mulai membangun jalur perdagangan di Langkat Hulu. Jalur perdagangan ini tidak hanya melalui jalur sungai, tetapi juga melalui darat dengan dibangunnya jalur kereta api ke Binjai untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan. Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa geliat perekonomian di wilayah Binjai mengalami peningkatan sejak dibukanya perkebunan tembakau disana. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pemerintah Kolonial sebagai pemegang kekuasaan berdampak pada kontrol ekonomi masyarakat yang terpusat kepada pemerintah Kolonial saja yang kemudian secara leluasa dapat mengatur jalannya perekonomian rakyat.

Sebagai kota Binjai mulai semakin tumbuh sempurna. Bersamaan dengan majunya perekonomian rakyat, maka jalan-jalan utama kota dan bangunan-bangunan seperti rumah sakit, pusat pasar, kantor pos, stasiun kereta api

juga mulai berdiri. Pemerintah Kolonial juga tidak lupa memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk turut berperan dalam kegiatan perekonomian, seperti saudagar-sudagar Cina, Arab, dan India selain pedagang-pedagang dari Eropa. Selain itu bertambah pula spesialisasi kerja dan tenaga kerja. Mulai dari buruh, mandor, pegawai administratif, sampai ke Kontelir. Pemerintah Kolonial juga mulai memberlakukan pajak bagi para pengusaha yang menanamkan modalnya di Binjai. Dengan demikian Binjai sebagai *gemeente* telah memperlihatkan cirinya sebagai kota.

Terkait peristiwa Perang Timbang Langkat yang tanggal terjadinya dijadikan sebagai hari lahir kota Binjai, dapat dijelaskan disini bahwa peristiwa tersebut memang benar adanya terjadi di daerah Langkat Hulu (wilayah Binjai sekarang). Dan jika kemudian tanggal terjadinya peristiwa heroisme tersebut dihubungkan dengan hari lahir kota Binjai, maka pastilah ada banyak sekali pertimbangan yang menyebabkannya. Begitu bermaknanya arti penting peristiwa perang Timbang Langkat sehingga kemudian Panitia yang menetapkan hari jadi kota Binjai sehingga jatuh pada tanggal 17 Mei 1872. Dalam hal Binjai, peristiwa perang Timbang langkat dinilai mempunyai simbol kondisi heroisme yang patut untuk dikenang. Namun sebuah peristiwa yang secara empirik bisa dianggap sebagai asal muasal sebuah kota dapat ditinggalkan, jika saja peristiwa tersebut tidak memberi rangsangan normatif apapun. Maka tentu saja sangat mudah memahami pada apa yang terjadi di Indonesia saat ini dimana tidak ada satu pun kota-kotanya mengambil tanggal hari jadi berdasarkan peristiwa atau tanggal kota tersebut diresmikan sebagai *gemeente* oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Penolakan pengakuan hari jadi kota pada peristiwa yang sama sekali tidak memberikan rangsangan yang inspiratif dapat terjadi hanya karena hal yang sederhana, yaitu tidak adanya bukti otentik. Bukti bahwa pada tanggal tersebut berdiri sebuah pemukiman disebut ekalitas yang kini disebut kota. Tetapi di atas semua itu, penolakan pengakuan hari lahir kota

berdasarkan penetapan *gemeente* pada suatu wilayah oleh Kolonial Belanda sebenarnya disebabkan oleh pertanyaan yang sederhana – untuk apa hari lahir sebuah kota dicari kalau bukan untuk mengingatnya setelah ditemukan, mengingat sesuatu yang memang sepantasnya diingat? Tetapi apakah yang sepantasnya diingat, kalau bukan peristiwa berharga untuk dapat menjawab tantangan di masa kini? Maka, jadilah kota Binjai mengambil tanggal peristiwa perang Timbang Langkat sebagai sebuah ritual tahunan yang mengingatkan rakyatnya pada sebuah peristiwa yang mengandung pesan-pesan historis dan simbolik bagi saat ini dan yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu hari jadi kota Binjai yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1872 berdasarkan peristiwa heroik perang Timbang Langkat dinilai layak berdasarkan alasan tersebut. Bahwa pemerintah kemudian berkeinginan masyarakatnya dapat merayakan hari jadi kota sekaligus mengenang peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di wilayah Binjai, dan hal ini tanpa disadari telah mengaburkan unsur hari jadi kota yang sebenarnya. Yaitu sejak Binjai ditetapkan menjadi *gemeente* oleh pemerintah Kolonial Belanda pada tanggal 23 Juli 1903.

Keinginan untuk memiliki hari jadi yang sekaligus merupakan lambing sejarah kota adalah sebuah gejala sosial-politik yang sangat dapat dipahami pada era Orde Baru. Dimana kegairahan dalam usaha pembangunan dinilai tidak bisa digerakkan hanya dari konsep-konsep subjektif masa kini yang digambarkan sebagai hal yang memuaskan atau pun kritikan terhadap situasi dan kondisi sekarang yang masih jauh dari harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda TK II Kotamadya Binjai. 1997. *Sekilas Wajah Kotamadya Binjai*.
 Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif: Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta, UGM Press.

Wiwik Lestari, Hari Jadi Kota Binjai Dalam Tinjauan Historis

- Daldjoeni. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung, PT. Alumni.
- Harahap, Yusuf. 1994. *Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah*. Pemda Tingkat I Sumut.
- Menno, S. 1991. *Antropologi Perkotaan*. Jakarta, Gramedia.
- Sinar, Tengku Luckman. 1980. Dalam Prisma : *Perang Besar Dalam Kampung Kecil, Riwayat Perjuangan Rakyat Sunggal*. Jakarta, LP3ES.
- _____. 1986. *Sari Sejarah serdang II*. Jakarta, Depdikbud.
- _____. 2007. *Sejarah Medan Tempo Doeloe*. Medan, Perwira.
- UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/26TAHUN2007UU.htm>. Diakses : 19 Desember 2016.
- Admin. 2016. *Teori Kota dan Citra Kota*. e-journal.uajy.ac.id. Diakses : 19 Desember 2016.